

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu keadaan dinamis yang sifatnya multi dimensional dan hasil dari adaptasi seseorang terhadap lingkungannya. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena memiliki peran yang sangat besar untuk membantu manusia untuk melakukan aktivitas sehari – harinya (Mckenzie, J.F, 2007 : 4). Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (Republik Indonesia, 2009). Kita sebagai manusia harus senantiasa mempertahankan kesehatan dengan melakukan kegiatan yang baik bagi kesehatan, melakukan pola hidup sehat, serta melakukan upaya pencegahan lainnya.

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang mengupayakan jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu dengan dilaksanakannya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional oleh pemerintah merupakan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional tidak lagi berpusat di Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, namun pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Prinsip tersebut memberlakukan

pelayanan kesehatan yang lebih difokuskan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama salah satunya, yaitu Puskesmas yang akan menjadi gerbang utama peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses pelayanan kesehatan (Republik Indonesia, 2007).

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dasar regulasi promotif dan preventif JKN berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan (Republik Indonesia, 2018). Pelayanan promotif dan preventif sangat penting di era JKN karena masyarakat diberikan informasi kesehatan dan pengetahuan kepada masyarakat cara mencegah dan mengurangi risiko dari suatu penyakit salah satunya pengendalian penyakit kronis dan katastrofik meliputi penyakit diabetes melitus, ginjal kronik, jantung koroner, dan hipertensi.

Penyakit Katastrofik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu, pembiayaan BPJS Kesehatan juga akan meningkat dan akibatnya, pembiayaan akan mengalami defisit. Karena hal itulah, BPJS Kesehatan harus menekankan pelayanan promotif dan preventif, meliputi kegiatan pemberian pelayanan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana, skrining riwayat kesehatan, pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu, dan peningkatan kesehatan program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) yang dijalankan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). BPJS

Kesehatan juga terus mendorong Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam penguatan pelayanan promotif dan preventif untuk mengoptimalkan pelayanan bagi peserta JKN dan memberikan dampak peningkatan derajat kesehatan serta mendukung pencapaian Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) di FKTP.

Menurut Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan (2019) data realisasi skrining riwayat kesehatan dapat diketahui melalui mobile JKN dan website BPJS Kesehatan. Peserta JKN yang telah melakukan skrining riwayat kesehatan sebanyak 4,8 juta peserta (2% dari total peserta JKN-KIS). Selanjutnya data realisasi kegiatan prolanis di Indonesia yang masih terbilang rendah, seperti di provinsi Papua Barat hanya 1.133 (6,5%) penderita hipertensi dan hanya 625 (13%) penderita *diabetes mellitus* yang terdaftar dan memanfaatkan pelayanan prolanis. Ini juga disebabkan oleh masih sedikitnya klub-klub prolanis yang dibentuk oleh FKTP.(Triwiyono, Rasio Peserta Prolanis Terkendali di Papua Barat Rendah, 2020). Jadi, kegiatan promotif dan preventif di FKTP masih belum maksimal.

Menurut penelitian Ulfa Alfiana Putri et al. (2022) terkait pelayanan promotif dan preventif, khususnya sebagai peserta JKN dalam program pemberian imunisasi hanya mengandalkan kegiatan yang diselenggarakan posyandu terdekat atau imunisasi yang diselenggarakan oleh RT/RW sekitar, sama dengan pelayanan KB sendiri masyarakat tidak mengetahui bahwa BPJS Kesehatan juga ikut meng-*cover* program tersebut. Akhirnya, sebagian besar dari mereka mencari pelayanan tersebut secara mandiri tanpa bantuan BPJS Kesehatan. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang didapatkan peserta JKN bahwa BPJS Kesehatan dapat digunakan untuk pelayanan imunisasi.

Menurut penelitian Rosidah Patimah (2019) dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat oleh BPJS Kesehatan di Kecamatan Babulu kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan masih belum optimal. Hal tersebut dilihat dari pelayanan promotif dan preventif yang masih terdapat kekurangan dalam setiap indikator pelayanannya, meliputi penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar, keluarga berencana, dan skrining kesehatan, yang dilaksanakan, ditanggung, dan dijamin oleh BPJS Kesehatan melalui kemitraan baik bersama pemerintah, lembaga kesehatan maupun swasta, serta lembaga terkait lainnya. Pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan di Kecamatan Babulu kabupaten Penajam Paser Utara yang bersifat pelayanan promotif dan preventif masih dirasa kurang optimal karena promosi kesehatan yang dilakukan hanya bersifat ajakan untuk berlaku hidup sehat, seperti ajakan untuk melakukan cek kesehatan secara rutin, slogan, dan baliho yang mengajak menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit menular. Selain itu Peserta JKN masih belum mengetahui bahwa pelayanan imunisasi, skrining kesehatan, kegiatan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis), dan program KB yang dapat di-cover oleh BPJS Kesehatan. (Ulfa Alfiana et al., 2022)

Menurut penelitian Fenti Kusuma Dewi (2015) Kegiatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatilawang sangat disayangkan ketika ternyata masih banyak lapisan masyarakat yang tidak memahami prosedur dan cara berobat dengan menggunakan layanan BPJS akibat kurang terpapar informasi. Terdapatnya beberapa kondisi faktual yang dapat ditemui di lapangan yakni belum sepenuhnya masyarakat mengetahui prosedur pemanfaatan JKN pada pelayanan kesehatan.

Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara terhadap staff di Puskesmas Kauman kegiatan pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif kurang optimal dan peserta JKN

kurang mengetahui tentang pelayanan promotif dan preventif seperti kurang edukasinya pelayanan imunisasi dasar dan KB, hanya mengedukasi peserta JKN tentang skrining riwayat kesehatan dan kegiatan Prolanis berupa senam sehat peserta prolanis yang dilaksanakan seminggu sekali di Puskesmas Kauman. Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara terhadap peserta JKN di Puskesmas Kauman bahwa pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif kurang diketahui oleh peserta karena beberapa hanya mengetahui program prolanis saja selebihnya mereka tidak mengetahui program yang diberikan BPJS kesehatan di Puskesmas Kauman.

Pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan promotif dan preventif dipengaruhi oleh pengetahuan. Apabila pengetahuan dari peserta JKN rendah maka pemanfaatan pelayanan promotif dan preventif juga akan rendah yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan dan resiko akan kesalahpahaman dalam pelayanan kesehatan khususnya pelayanan promotif dan preventif menjadi tinggi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Tingkat Pengetahuan Peserta JKN Terhadap Pelayanan Promotif dan Preventif Yang Diberikan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kauman Tulungagung”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tingkat Pengetahuan Peserta JKN terhadap pelayanan Promotif dan Preventif yang diberikan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kauman Tulungagung?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui tingkat pengetahuan peserta JKN terhadap pelayanan promotif dan preventif yang diberikan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kauman Tulungagung.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui tingkat pengetahuan peserta JKN terhadap pengertian dan jenis dari pelayanan promotif dan preventif yang diberikan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kauman Tulungagung berdasarkan usia.
2. Mengetahui tingkat pengetahuan peserta JKN terhadap pengertian dan jenis pelayanan promotif dan preventif yang diberikan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kauman Tulungagung berdasarkan jenis kelamin.
3. Mengetahui tingkat pengetahuan peserta JKN terhadap manfaat pelayanan promotif dan preventif yang diberikan BPJS Kesehatan di Puskesmas Kauman Tulungagung berdasarkan tingkat pendidikan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1) Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Sebagai bahan acuan untuk lebih meningkatkan pelayanan promotif dan preventif, terutama mempermudah akses masyarakat mencari tahu program pelayanan promotif dan preventif yang diberikan BPJS Kesehatan di Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama.

### **2) Bagi Masyarakat**

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelayanan promotif dan preventif yang diberikan BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama secara mandiri.

### **3) Bagi peneliti lain**

Menambah data dasar bagi peneliti berikutnya untuk menggali dan melakukan penelitian selanjutnya.

### **4) Bagi Puskesmas**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman praktis untuk menerapkan pengetahuan peserta JKN tentang pelayanan promotif dan preventif yang diberikan BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.